

BAB III

KEPENTINGAN NASIONAL MALAYSIA DALAM MEMATUHI MOU

3.1 Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Mematuhi MoU 2022 : OCS

Dalam membentuk dan menjalani kerja sama bilateral, tiap negara memiliki tujuan masing-masing. Dalam upaya mengkomodasi kepentingan tersebut, kebijakan yang dirumuskan oleh kedua negara memiliki kaitan dengan kepentingan negara masing-masing (Rudy T. M., 2002). Kepentingan nasional didefinisikan oleh (Devetak, Burke, George, & George, 2007) dengan kepentingan nasional merupakan hal yang nyata dan dimiliki oleh setiap negara dalam hubungan antar bangsa, walau dalam implementasinya negara-negara memiliki kepentingan nasional berbeda yang disebabkan oleh berbagai faktor baik secara historis, ekonomi, geografis, dan politis. Kepentingan yang dimiliki negara dapat berubah, beriringan dengan prioritas yang dimiliki dan juga agenda yang dibawa oleh pemimpin negara ataupun pemerintahan negara tersebut. Dalam menentukan kebijakannya, negara harus mempertimbangkan juga dampaknya bagi internal negaranya. Dalam konteks pengiriman, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan Malaysia melakukan pertimbangan untuk memperbaiki alur, proses, aturan, dan fasilitas penunjang yang harus ditingkatkan.

Kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia merupakan salah satu bentuk kerja sama G-to-G sebagai salah satu dasar dalam upaya perlindungan PMI di Malaysia dan telah diupayakan oleh kedua negara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah membentuk aturan yang ditujukan untuk melindungi PMI di Malaysia, salah satunya adalah dengan membentuk

Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini membahas mengenai penempatan PMI di Malaysia, serta perlindungan PMI dibawah MoU yang telah disepakati, baik dalam sektor formal maupun non-formal. Moratorium pertama yang dilakukan pada tahun 2009, dimana kedua pihak melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan mekanisme alur pengiriman, penempatan, dan perlindungan PMI di Malaysia. Tindakan ini merupakan salah satu upaya diplomatik politis yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan tekanan pada Malaysia apabila mereka menolak untuk menyetujui MoU tersebut. Akan tetapi, fakta bahwa Malaysia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjamin perlindungan dan menjamin hak-hak pekerja migran serta keluarga mereka. Indonesia menganggap bahwa selama Malaysia belum melakukan ratifikasi, maka upaya kedua negara dalam menyusun MoU dianggap sia-sia.

Pemerintah Malaysia sebenarnya memiliki aturan mengenai hukum yang dapat melindungi PMI. Seperti *Employment Act 1995*, yang membahas mengenai ketentuan yang berkaitan dengan hak dasar yang diterima pekerja seperti upah, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja lainnya (Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, 2023). Kemudian ada *Immigration Act 1959/63* yang mengatur tentang masalah imigrasi, mencakup prosedur penerimaan dan penempatan pekerja migran di Malaysia (Jabatan Imigresen Malaysia, 2006). Meskipun Malaysia memiliki undang-undang yang dirancang untuk memberikan perlindungan untuk pekerja migran termasuk PMI, pelanggaran terhadap hak-hak mereka tetap masih terjadi. Faktor yang menyebabkan masih maraknya pelanggaran adalah implementasi

hukum yang kurang maksimal serta konsisten, keterbatasan wewenang dan sumber daya penegak hukum, adanya praktik ilegal dalam proses perekrutan dan penempatan kerja, serta kondisi ekonomi yang sulit meningkatkan risiko eksploitasi terhadap pekerja migran.

Hingga saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan permintaan tenaga kerja di luar negeri dan salah satunya adalah Malaysia. Dalam proses untuk menyepakati MoU, kedua negara memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah Indonesia berupaya perlindungan bagi PMI yang ada di Malaysia. Sementara Malaysia sendiri, berusaha untuk melindungi struktur negaranya. Selain itu, Malaysia juga kekurangan tenaga kerja lokal yang mau bekerja di sektor non-formal, sehingga berpengaruh pada penghasilan negara. Dalam waktu yang bersamaan, Indonesia dan Malaysia dalam proses pemulihan ekonomi pasca adanya pandemi *Covid-19* yang hampir melumpuhkan perekonomian kedua negara.

Dari proses pemulihan ekonomi ini, dapat dilihat bahwa kepentingan kedua negara berbeda, meski tujuannya sama. Indonesia harus segera membuka pengiriman PMI ke luar negeri termasuk Malaysia untuk mendapatkan devisa dan remitansi dari pengiriman. Sementara Malaysia, harus segera menghidupkan lagi sektor perekonomian mereka di berbagai bidang. Malaysia sendiri kekurangan sumber daya manusia, terutama pada sektor industri, konstruksi, dan rumah tangga. Dilain sisi, Indonesia juga menginginkan Malaysia untuk menyetujui kepentingan mereka untuk memberikan perlindungan terhadap PMI yang berada di Malaysia.

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak kurang lebih 43.163 PMI yang berada di Malaysia (BP2MI, 2022). Dengan total pengiriman kurang lebih sebanyak 1,7

juta orang. Dengan jumlah yang masif ini, remitansi yang didapatkan oleh Indonesia mencapai USD 3 Juta (Bank Indonesia, 2021).

3.2 Kepentingan Malaysia dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Pada awal 2020, dunia menghadapi suatu fenomena kesehatan. Dimana sebuah virus yang dinamakan sebagai *Corona Virus Infectious Disease 2019* (Covid-19). Bermula dari wabah yang terjadi di Cina, atau tepatnya Kota Wuhan. Kemudian terus menyebar hampir keseluruhan penjuru dunia. Negara-negara yang terjangkit virus ini termasuk Indonesia dan Malaysia. Pandemi *Covid*, cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor yang ada, termasuk sektor kesehatan dan ekonomi. Adanya pandemi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta menyebabkan jumlah pengangguran yang meningkat. Pemerintah berbagai negara juga melakukan pembatasan kegiatan bagi masyarakat. Negara-negara banyak yang terpaksa harus menutup perbatasan keluar dan masuk untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Malaysia mengalami kontraksi sebesar 5,6% yang merupakan kontraksi terbesar selama 22 tahun terakhir (Ministry of Economy Departement of Statistics Malaysia, 2021). Di waktu yang sama, Indonesia juga mengalaih kontraksi ekonomi sebesar 2,07% yang menyebabkan tingkat pengangguran bertambah sebanyak 5,28% (Pratiwi, 2022)

Pembatasan migrasi ini juga berdampak pada negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia. Saluran pengiriman PMI ke Malaysia akhirnya

harus terhenti sementara. Keputusan ini dilandaskan oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 yang membahas mengenai Penghentian Sementara Penempatan PMI, menimbang faktor keamanan untuk kedua negara. Wabah yang sedang berlangsung merupakan salah satu pertimbangan keamanan yang harus diperhatikan dalam melakukan penghentian penempatan ke negara tujuan (Witono, 2021).

Dilain sisi, Malaysia juga mengeluarkan kebijakan *Movement Control Order* (MCO) yang ditujukan untuk membatasi pergerakan masyarakat baik yang akan kelyar atau akan masuk ke dalam wilayah Malaysia. Pembatasan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan selama pandemi ini, menyebabkan sektor perekonomian lumpuh. Pasca periode *New Normal*, telah diberlakukan, negara-negara berbondong-bondong berusaha untuk memulihkan perekonomian. Tidak terkecuali dengan Indonesia dan Malaysia. Malaysia yang mengalami krisis tenaga kerja pasca pandemi, terutama pada sektor perkebunan sawit. Dengan adanya fenomena kekurangan tenaga kerja ini menyebabkan industri sawit di Malaysia mengalami penurunan penghasilan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat lokal Malaysia enggan untuk bekerja di sektor perkebunan sawit karena dinilai cukup sulit untuk dijalani.

Selama MCO, yang dimulai pada periode Maret 2020, Malaysia mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Pada kuartal kedua di 2020, Malaysia mengalami penyusutan Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 17.1% dibandingkan periode yang sama ditahun 2019 (Ministry of Economy Departement of Statistics Malaysia, 2020). Penurunan produksi industri sawit yang selama ini

bergantung pada kehadiran PMI, selama pandemi mengalami kekurangan tenaga kerja. Pada tahun 2020, produksi sawit mengalami penurunan menjadi 19.1 juta ton, dari sebelumnya menghasilkan 19,86 juta ton (Aman, Warta Sawit, 2020). Pada tahun 2021, industri sawit mengalami kekurangan tenaga kerja mencapai sekitar 120.000 pekerja yang kemudian menyebabkan penurunan potensi produk sekitar 10-15% (Aman, Pekerja Tempatan Penentu Masa Hadapan Industri Sawit Malaysia, 2021).

Pasca pandemi, banyak sektor tenaga kerja yang mengalami kekosongan. Disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menjadi korban jiwa atau juga karena adanya pembatasan pada masyarakat. Oleh karena itu, Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja migran segera untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga perekonomian mereka bisa tetap berjalan. Masyarakat Malaysia juga kurang berminat untuk menggeluti beberapa pekerjaan dengan beban yang berat, dengan alasan pendukung, bahwa mereka telah memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga merasa bahwa mereka kurang minat untuk bekerja dalam sektor pekerjaan yang memiliki gaji kecil dengan resiko yang cukup tinggi dan juga tidak memerlukan keterampilan khusus. Pekerjaan semacam ini umumnya banyak diminati oleh PMI. Semenjak maraknya PMI masuk ke Malaysia, masyarakat lokal lebih memilih untuk mempekerjakan PMI dalam sektor non-formal seperti jasa rumah tangga, yang kemudian menimbulkan ketergantungan pada sektor tersebut (Kementerian Sumber Manusia, 2021). PMI juga dinilai memiliki mobilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Mereka dapat berpindah dari sektor satu ke sektor lainnya yang membutuhkan, sehingga pemerintah Malaysia menilai bahwa dengan adanya PMI

ini dapat menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor yang membutuhkan (Kementerian Sumber Manusia, 2021).

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, pada Oktober 2023, tercatat bahwa sektor manufaktur membutuhkan 20.000 tenaga kerja, sektor jasa membutuhkan 50.000 tenaga kerja, dan konstruksi sebanyak 50.000 tenaga kerja. Namun pada sektor agrikultur, konstruksi, dan perkebunan masih membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri mereka (International Labour Organization, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki ketergantungan terhadap pekerja migran dalam perekonomian mereka. Pekerja migran menguasai 15% lapangan kerja yang tersedia di Malaysia dan membantu dalam meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) sebanyak 1.1% (Ng & Mar, 2019).

3.2.1 Kebutuhan Malaysia akan PMI

Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi PMI, didorong oleh kebutuhan yang mendesak di berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2023, Malaysia mempekerjakan sekitar 2,7 juta PMI, dengan 1,6 juta diantaranya masuk melalui jalur resmi, sementara sisanya bekerja secara resmi (International Labour Organization, 2023).

Kebutuhan Malaysia akan PMI terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, sektor seperti perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan rumah tangga sangat bergantung pada adanya tenaga kerja migran. PMI sering kali mengisi posisi yang kurang diminati oleh tenaga kerja lokal, khususnya pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar dan berada di lingkungan kerja yang keras atau

terpencil (International Labour Organization, 2022). Kedua, Malaysia menghadapi tantangan demografis dengan populasi menua dan tingkat kelahiran yang menurun, yang kemudian menciptakan kekosongan dalam angkatan kerja produktif (World Bank, 2024). Oleh karena itu, PMI memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi Malaysia dengan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut.

Dalam sektor domestik, banyak keluarga di Malaysia bergantung pada PMI untuk membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia. Urbanisasi yang bergerak cepat dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja formal semakin meningkatkan permintaan akan pekerja rumah tangga migran (Asia Development Bank, 2022). Di sektor perkebunan, khususnya industri minyak sawit dan karet, PMI menjaid tonggak dalam menjaga keberlangsungan produksi, mengingat bahwa pekerjaan di sektor ini seringkali melibatkan kondisi kerja yang berat dan kondisi yang terpencil (International Organization for Migration, 2023).

Secara keseluruhan, keberadaan PMI sangat penting bagi ekonomi Malaysia, mengisi kekosongan tenaga kerja di berbagai sektor penting dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan yang efektif terhadap pekerja migran menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dengan cara yang adil dan manusiawi.

3.2.2 PMI vs Foreign Workers Composition

Malaysia telah menjadi salah satu tujuan utama bagi pekerja migran dari berbagai negara, dengan Pekerja Migran Indonesia memegang porsi signifikan dalam populasi pekerja asing yang ada di negara tersebut. Pada tahun 2023, Indonesia mendominasi angka pekerja migran dengan perbandingan pekerja migran dari negara lain termasuk Bangladesh, Nepal, dan Vietnam juga memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan berbagai sektor ekonomi di Malaysia.

Pekerja migran yang berasal dari Bangladesh diperkirakan berjumlah sekitar 380,000 orang pada tahun 2023. Sebagian dari mereka bekerja di sektor konstruksi, manufaktur, dan perkebunan, sering mengisi posisi yang memerlukan tenaga fisik serta berada di lingkungan kerja yang menantang (Aziz, 2023). Nepal juga merupakan salah satu sumber utama tenaga kerja migran dengan angka yang sama yaitu 380,000 pekerja Nepal yang berada di Malaysia (Mandal, 2024).

Sementara itu, pekerja yang berasal dari Filipina berjumlah kurang lebih 160,000 orang pada tahun 2023, dan mereka umumnya terlibat pada sektor jasa, termasuk perawat kesehatan, pekerja rumah tangga, dan layanan masyarakat. Kebijakan perlindungan pekerja migran dari pemerintah Filipina sangat kuat, sehingga hak mereka terlindungi dengan baik (The Philippine Star, 2023). Vietnam mengirim kurang lebih 150,000 pekerja migran ke Malaysia, terutama di sektor manufaktur dan layanan, termasuk pekerja di pabrik dan sebagai staf pendukung di berbagai industri (Vietnamnet, 2023).

Secara keseluruhan, kehadiran pekerja migran dari negara-negara selain Indonesia sangat penting dalam mendukung berbagai sektor vital di Malaysia dan

mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kebijakan perekrutan dan perlindungan yang efektif menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan semua pekerja migran terlindungi dengan baik.

3.3 Sikap Inkonsisten Malaysia dalam Mematuhi MoU bersama Indonesia

Sikap inkonsisten merupakan sikap dimana suatu pihak akan bersikap kontradiktif, bertentangan, dan tidak berkesesuaian dengan apa yang pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Sikap ini dinilai terlihat dari tindakan Malaysia yang awalnya sanggup untuk menyetujui MoU yang telah disusun bersama Indonesia mengenai perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. Tentunya MoU yang disusun berisikan hal-hal yang menjadi perhatian dari kedua negara, terutama Indonesia. Menandatangani MoU yang telah disusun, berarti kedua negara telah menyepakati dan menyanggupi untuk mematuhi poin-poin yang ada di dalamnya.

MoU yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2022 yang lalu, merupakan salah satu upaya Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada PMI yang berada di Malaysia. Salah satu poin utamanya adalah perekrutan dan penempatan PMI dilakukan dengan *One Channel System* atau Sistem Penerimaan Satu Kanal. Dengan adanya sistem ini tentunya akan mempermudah kedua negara untuk memperoleh data PMI dan juga mempermudah kedua negara untuk memberikan hak-hak bagi PMI di Malaysia. Karena OCS dalam penggunaannya dirancang untuk meminimalisir biaya penempatan serta

menyederhanakan prosedur penempatan kerja berdasarkan hukum dan regulasi yang ada dalam kedua negara.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Malaysia bersikap inkonsisten dengan tetap menjalankan sistem mereka yang telah ada sejak tahun 2018 yaitu *Sistem Maid- Online*. Yang dalam pemberlakuan dan penggunaannya, berbanding terbalik dengan OCS. Sehingga yang seharusnya OCS dapat memepermudah kedua negara untuk mendata dan memberikan perlindungan pada PMI, dengan penggunaan SMO ini malah mempermudah PMI non-prosedural atau ilegal untuk masuk.

Sikap inkonsisten Malaysia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti tekanan politik ataupun diplomatik. Pemerintah Malaysia mungkin saja menandatangani MoU dengan Indonesia dengan dalih untuk memperbaiki hubungan diantara keduanya khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Tanpa memikirkan implikasi apa yang kemudian akan mereka dapatkan setelah MoU tersebut disepakati. Pasca pandemi Covid-19, Malaysia mengalami kekurangan tenaga kerja dalam berbagai sektor penting seperti perkebunan, manufaktur, hingga konstruksi. Kekurangan tenaga kerja ini disebabkan oleh pembatasan selama pandemi berlangsung. Prefrensi masyarakat lokal terhadap pekerjaan yang lebih ringan serta gaji yang tinggi, juga menjadi penyebab terjadinya fenomena kekurangan tenaga kerja dalam berbagai sektor.

Malaysia merespon kondisi ini dengan mengadopsi penggunaan SMO yang memungkinkan mereka untuk melakukan perekrutan dan penempatan PMI dengan

biaya rendah dibandingkan dengan penggunaan OCS (International Organization for Migration, 2023). Dengan penggunaan SMO, proses perekrutan dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, dibandingkan dengan proses melalui OCS yang membutuhkan waktu 3-6 bulan proses. SMO menawarkan biaya rekrutmen yang lebih murah hingga 30-50% (Federation of Malaysian Manufacturers, 2022).

Kecepatan dan efisiensi dari penggunaan SMO ini memungkinkan Malaysia memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka yang mendesak, terutama dalam sektor yang kurang diminati oleh pekerja lokal. Meskipun penggunaan SMO memberikan manfaat dalam jangka pendek bagi Malaysia dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menjaga keberlangsungan perekonomian untuk terus berjalan, hal ini juga menimbulkan masalah dalam hubungan bilateral dengan Indonesia. Tindakan Malaysia yang tidak bersikap konsisten dalam mematuhi MoU yang telah disepakati bersama, berpotensi dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan berbagai isu yang berkaitan dengan hak serta perlindungan pekerja migran.